

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kecamatan Padalarang memiliki karakteristik fisik lahan yang khas. Terbentuk dari tujuh formasi batuan yang terdiri dari anggota batuan sedimen yang rentan pelapukan hingga batuan beku yang masif, didominasi tanah alluvial yang kurang peka terhadap erosi, curah hujan tinggi (>1500 mm/tahun), topografi yang landai hingga sangat curam serta memiliki bentukan asal berbeda yang membuat pengkajian kesesuaian lahan menjadi sangat menarik.
2. Kelas kesesuaian lahan untuk permukiman di Kecamatan Padalarang terdiri dari dua klasifikasi yaitu sesuai (Kelas I) dan tidak sesuai (Kelas III). Kelas I tersebar di Kecamatan Padalarang bagian selatan pada lahan yang memiliki jenis tanah aluvial dengan topografi landai, tidak memiliki anggota batuan lempung dan gamping serta tidak memiliki potensi bencana banjir, longsor dan tanah amblas. Sedangkan Kelas III tersebar di bagian utara Kecamatan Padalarang yang memiliki lereng bergelombang hingga sangat curam, memiliki anggota batuan lempung dan gamping serta memiliki potensi bencana longsor dan banjir bandang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka terdapat beberapa saran

yang dapat dijadikan pertimbangan, yaitu sebagai berikut.

1. Pembangunan permukiman di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat hendaknya melibatkan seluruh aspek pembangunan. Pembangunan kawasan permukiman harus dibangun oleh segenap komponen mulai dari masyarakat, pemerintah, aparat hingga pengembang.

2. Pemerintah Kecamatan Padalarang diharapkan lebih selektif dalam memberikan ijin mendirikan bangunan (IMB) yang harus benar-benar mengacu pada RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) yang telah dibuat agar tidak kembali terjadi kesalahan dalam pemilihan kawasan permukiman. Selain itu pemerintah bertanggungjawab dalam mensosialisasikan kawasan yang sesuai untuk permukiman dan mana yang harusnya dijadikan kawasan konservasi.
3. Masyarakat dan pengembang seharusnya membangun kawasan permukiman yang disertai dengan adanya IMB dan senantiasa berhubungan berhubungan dengan pemerintah secara terorganisis agar dapat memilih kawasan permukiman yang aman dan nyaman dan tidak menyimpan potensi bencana.
4. Diperlukan penempatan ahli yang berkopentem yang berada di instansi pemerintah agar dapat memberikan masukan dalam pembangunan khususnya pada kawasan permukiman agar sesuai dengan kaidah kesesuaian lahan untuk permukiman baik fisik maupun sosial.
5. Guru sebagai agen pembangunan hendaknya dapat mengajarkan pada peserta didik konsep-konsep pembangunan ruang yang disesuaikan dengan kearifan lokas setempat agar memberikan gambaran yang lengkap pada peserta didik yang nantinya menjadi penerus bangsa agar memiliki kesadaran yang tinggi dalam pembangunan ruang terutama pada kawasan permukiman.
6. Pengembangan kawasan permukiman di Kecamatan Padalarang selanjutnya dikembangkan atas dasar penelitian ini yakni pada kesesuaian lahan potensial (belum terbangun) yang termasuk pada Kelas I.
7. Penelitian ini hendaknya lebih disempurnakan kembali terutama dengan menambahkan aspek sosial yang mempengaruhi perkembangan kawasan permukima. Selain itu, pendekatan multidisipliner perlu dikembangkan guna menyempurnakan kajian evaluasi kesesuaian lahan untuk permukiman di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.